

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA TEWANG
RANGKANG, KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING,
KABUPATEN KATINGAN**

***Dilla Anselya¹⁾**

1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang membutuhkan penanganan sistematis. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan melalui bantuan bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi PKH di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Namun terdapat kendala dalam hal verifikasi data penerima, pemahaman masyarakat, dan koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas implementasi program perlu difokuskan pada pembaruan data dan penguatan peran pendamping.

Kata Kunci: PKH, Kemiskinan, Implementasi, Kebijakan Publik, Desa;

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh, negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Masalah kemiskinan tidak hanya sudah lama ada di lingkungan kita, tetapi gejalanya semakin meningkat sebagai respon terhadap krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Indikator yang sering digunakan untuk menentukan nilai kemiskinan yaitu melihat dari tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi pada anak dan lain sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain rendahnya pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang

berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada Pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya (Indra Kertati:2017).

Kemiskinan masih menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Tewang Rangkang. Pemerintah merespons permasalahan ini melalui berbagai program, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan sosial bersyarat yang menekankan pada akses pendidikan dan kesehatan. Desa Tewang Rangkang merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan intervensi melalui PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang diluncurkan sejak tahun 2007 untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, khususnya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Melalui program ini, keluarga penerima manfaat diwajibkan memenuhi syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan untuk ibu hamil dan imunisasi untuk anak. Manfaat PKH saat ini juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Selain mendorong KPM untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, KPM PKH juga didampingi untuk mendapatkan program yang secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi center of excellence dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Namun, efektivitas program ini belum optimal, ditandai dengan permasalahan teknis seperti data tidak akurat, kurangnya pemahaman penerima manfaat, serta minimnya pemantauan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses implementasi PKH. Dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam, implementasi PKH di desa ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh, karena itu, penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program ini dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik merupakan fondasi yang digunakan pemerintah dalam merumuskan serta menjalankan berbagai program yang ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Kebijakan ini berperan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada kehidupan publik. Winarno (2014) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks kepentingan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, kebijakan publik mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintervensi kondisi sosial, ekonomi, maupun politik agar sesuai dengan visi pembangunan negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik mencakup proses yang melibatkan berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat. Di balik setiap kebijakan terdapat proses perumusan yang berdasarkan permasalahan nyata di lapangan serta pertimbangan hukum, sosial, dan ekonomi.

Ciri-ciri Kebijakan Publik:

Menurut Winarno (2014), kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dibuat oleh lembaga yang berwenang: seperti pemerintah pusat atau daerah.
2. Bersifat mengikat: wajib diikuti oleh masyarakat dalam cakupan tertentu.
3. Bertujuan untuk kepentingan umum: tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok.
4. Merupakan hasil dari proses politik dan administratif.
5. Dapat dievaluasi: keberhasilannya dapat diukur melalui indikator tertentu.

Jenis-jenis Kebijakan Publik:

Berdasarkan Subarsono (2013), kebijakan publik dapat dibagi menjadi:

1. Kebijakan distributif: mengalokasikan sumber daya kepada kelompok masyarakat, seperti bantuan sosial PKH.
2. Kebijakan regulatif: bertujuan mengatur perilaku masyarakat, seperti kebijakan penggunaan dana bantuan.
3. Kebijakan redistributif: mengalihkan sumber daya dari kelompok kaya ke kelompok miskin.

4. Kebijakan konstituen: berkaitan dengan pengaturan struktur dan fungsi lembaga pemerintah.

Proses Kebijakan Publik:

Subarsono (2013) menguraikan lima tahapan dalam proses kebijakan publik:

1. Perumusan masalah: mengidentifikasi isu atau kondisi yang membutuhkan tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda: memilih masalah yang perlu segera ditangani.
3. Perumusan kebijakan: merancang alternatif solusi berdasarkan analisis.
4. Implementasi kebijakan: pelaksanaan kebijakan oleh lembaga terkait, seperti Kementerian Sosial dalam program PKH.
5. Evaluasi kebijakan: menilai efektivitas kebijakan berdasarkan hasil di lapangan.

Teori implementasi Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) (Chairunnisa, Habibi, & Berthanila, 2023). Dalam implementasi secara umum, sebuah kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan kelompok sasaran, manfaat yang akan diterima, perubahan yang diinginkan, ketepatan lokasi program, kejelasan implementor, dan ketersediaan sumber daya. Semua elemen ini harus diperhatikan secara menyeluruh karena saling terkait dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Model Grindle memiliki keunikan dalam pendekatannya yang komprehensif terhadap konteks kebijakan, terutama dalam memahami dinamika antara implementor, penerima implementasi, dan potensi konflik yang mungkin muncul (Sutejo, 2019). Konteks implementasi mencakup aspek-aspek penting seperti kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap.). Prosesnya bisa berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan bisa mencakup perubahan-perubahan besar maupun kecil, yang kesemuanya diarahkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mazmanian dan Sabatier (1980) memperdalam pemahaman ini dengan menjelaskan bahwa implementasi sebenarnya adalah proses memahami apa yang terjadi setelah suatu program mulai dijalankan. Fokusnya adalah

pada kejadian dan kegiatan yang muncul setelah suatu kebijakan disahkan, termasuk usaha-usaha administratif dan dampak nyata yang ditimbulkan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya tentang menjalankan program, tapi juga tentang mengamati dan memahami konsekuensi dari kebijakan tersebut di lapangan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan hanya dapat dimulai setelah tujuan dan sasaran kebijakan ditentukan atau diidentifikasi melalui keputusan yang telah ditetapkan. Proses implementasi melibatkan berbagai pihak yang berperan aktif, dengan tujuan akhir untuk mencapai hasil yang sesuai dengan target dan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin. . Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan akses layanan dasar, mendorong perubahan perilaku, dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Mappasere & Suyuti, 2019), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tewang Rangkap. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang holistik tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi dalam proses implementasi program, termasuk interaksi antara pelaksana program, penerima manfaat, dan pemangku

kepentingan lainnya. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan yang mereka hadapi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Tewang Rangkang merupakan salah satu desa yang telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Penelitian ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti petugas PKH, aparatur desa, penerima manfaat PKH, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program. Fokus penelitian juga mencakup pengamatan terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat sebagai dampak dari program ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi beberapa teknik untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Yang dilakukan dengan beberapa teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama: penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah disaring dan disusun akan disajikan dalam bentuk naratif yang menggambarkan temuan-temuan utama dari penelitian. Penyajian data akan mencakup penjelasan rinci mengenai proses implementasi PKH, kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program, serta dampaknya terhadap penerima manfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tewang Rangkang menjadi salah satu wilayah sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) sejak beberapa tahun terakhir, dengan 76 keluarga penerima manfaat yang tersebar di berbagai RT/RW. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin sekaligus meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Selain itu, desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, seperti lahan pertanian dan perkebunan, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena

keterbatasan modal, teknologi, dan pengetahuan masyarakat. Bantuan yang diberikan bervariasi antara Rp150.000 hingga Rp1.200.000 per keluarga, disalurkan melalui bank BRI dan dikelola oleh tiga direktorat, yaitu Direktorat Rehabilitasi Sosial (20 penerima), Direktorat Jaminan Sosial (48 penerima), dan Direktorat Pemberdayaan Sosial (8 penerima). Program ini mewajibkan penerima untuk memenuhi komitmen tertentu, seperti memastikan anak-anak bersekolah secara rutin dan mengikuti pemeriksaan kesehatan di posyandu, sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Desa Tewang Rangkang menjadi salah satu wilayah sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) sejak beberapa tahun terakhir, dengan 76 keluarga penerima manfaat yang tersebar di berbagai RT/RW. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin sekaligus meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tewang Rangkang telah menjadi salah satu upaya penting untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat. Berdasarkan data empat tahun terakhir, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2021, terdapat 81 keluarga yang menerima bantuan, namun jumlah ini menurun menjadi 71 keluarga pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh verifikasi ulang data penerima untuk memastikan ketepatan sasaran. Pada tahun 2023, jumlah KPM kembali turun menjadi 67 keluarga, yang mencerminkan penyesuaian lebih lanjut dalam kriteria penerima dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah KPM meningkat menjadi 76 keluarga, menunjukkan jangkauan program untuk menjangkau lebih banyak keluarga miskin yang memenuhi syarat. Meskipun beberapa KPM mengeluhkan besaran bantuan yang kurang memadai untuk keluarga dengan banyak anak. Kendala lain seperti keterlambatan pencairan bantuan dan akses sulit ke fasilitas pendidikan serta kesehatan juga masih menjadi hambatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tewang Rangkang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat. Implementasi kebijakan ini dimulai dengan proses identifikasi keluarga penerima manfaat, yang melibatkan kerja sama antara pemerintah desa dan pendamping PKH. Pelaksanaan PKH di Desa Tewang Rangkang dalam konteks kebijakan menunjukkan

upaya keras dari berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan. Namun, tantangan seperti koordinasi yang tersendat, keterbatasan sumber daya, dan infrastruktur yang kurang mendukung masih menjadi batu sandungan. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan langkah konkret seperti memperbaiki sistem data, memperkuat koordinasi, dan mengalokasikan sumber daya yang lebih memadai. Dengan demikian, kebijakan ini dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tewang Rangkang telah memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi 76 keluarga penerima manfaat (KPM). Berdasarkan hasil penelitian, program ini berhasil meringankan beban ekonomi keluarga miskin, terutama untuk kebutuhan sekolah dan kesehatan anak, dengan bantuan tunai yang disalurkan secara berkala. Untuk mengoptimalkan efektivitas PKH di Desa Tewang Rangkang, beberapa langkah perbaikan perlu diambil. Pertama, memperkuat koordinasi antar-stakeholder dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang andal dan mengadakan pertemuan rutin terstruktur. Kedua, meningkatkan akurasi data penerima melalui verifikasi berkala yang melibatkan musyawarah desa untuk memastikan ketepatan sasaran. Ketiga, memastikan pencairan bantuan tepat waktu dengan menyempurnakan sistem administrasi. Keempat, memberikan pelatihan keterampilan kepada KPM agar mereka dapat mandiri secara ekonomi, sehingga ketergantungan pada bantuan jangka panjang dapat berkurang dan program ini lebih berkelanjutan dalam memutus rantai kemiskinan. Untuk peneliti selanjutnya dalam mengoptimalkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tewang Rangkang. Pertama, melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, khususnya calon penerima manfaat, untuk memastikan pemahaman yang baik tentang tujuan, manfaat, dan kewajiban dalam program PKH. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan peserta terhadap program. Kedua, melakukan verifikasi dan pembaruan data penerima bantuan secara rutin untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Hal ini penting agar keluarga yang sudah

tidak memenuhi kriteria tidak lagi menerima bantuan, dan keluarga yang layak dapat segera mendapatkan bantuan. Ketiga, memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada pendamping PKH agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, termasuk dalam hal monitoring dan evaluasi program. Keempat, menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan komunikasi antar-stakeholder. Misalnya, dengan menggunakan aplikasi berbasis web atau mobile untuk pendataan dan pelaporan.

REFERENSI

- Grindle, M. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Kementerian Sosial RI. (2023). Pedoman Umum PKH.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- BPS Kabupaten Katingan. (2024). *Data Kemiskinan dan Sosial Ekonomi*.
- Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.